



LURAH DUWET  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DUWET  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DUWET

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

10. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimeewaan Kepada Pemerintah Kalurahan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E)
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Pungutan Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24)
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51)

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80)
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
21. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Duwet Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2021 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DUWET**

dan

**LURAH DUWET**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan                              |     |                  |
| 1.1 Pendapatan Asli Kalurahan                        | Rp. | 30.500.000,00    |
| 1.2 Transfer   | Rp. | 1.842.945.000,00 |
| 1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah                    | Rp. | 1.500.000,00     |
| Jumlah Pendapatan                                    | Rp  | 1.874.945.000,00 |
| 2. Belanja Kalurahan                                 |     |                  |
| 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan              | Rp. | 913.719.817,00   |
| 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan                   | Rp. | 750.578.500,00   |
| 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                  | Rp. | 54.329.636,00    |
| 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat                   | Rp. | 82.250.000,00    |
| 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mend | Rp. | 109.518.014,00   |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan                     | Rp  | 1.910.395.967,00 |
| Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan                  | (Rp | 35.450.967,00)   |
| 3. Pembiayaan Kalurahan                              |     |                  |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan                            | Rp. | 85.450.967,00    |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan                           | Rp. | 50.000.000,00    |
| 3.3 Selisih Pembiayaan ( 3.1 – 3.2 )                 | Rp. | 35.450.967,00    |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia)
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Duwet

Ditetapkan di Duwet  
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Duwet  
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nur Ihsan Dwi Riyanti".

NUR IHSAN DWI RIYANTI

LEMBARAN KALURAHAN DUWET TAHUN 2023 NOMOR 6

## BERITA ACARA

### RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN

### BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

### KALURAHAN DUWET KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Aula Kalurahan Duwet, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan rapat/sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL dalam rangka membahas : Peraturan Kalurahan Duwet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2024.

Dalam Rapat/sidang bersama dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana Daftar Hadir terlampir. Dalam rapat/sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil Rapat / sidang antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dengan hasil sebagai berikut :

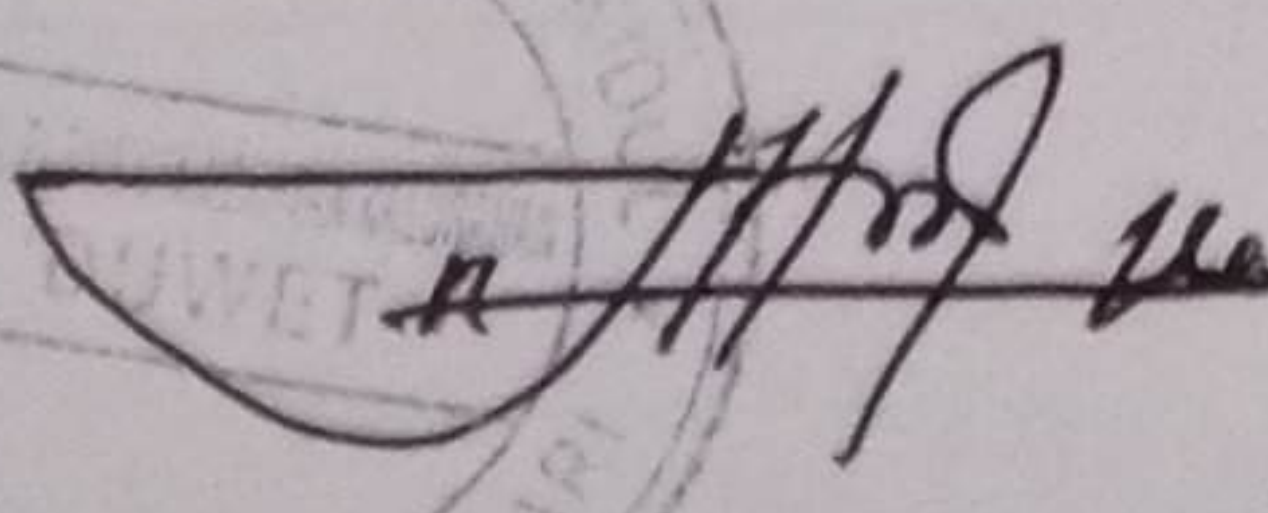
1. Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL sepakat Tentang Peraturan Kalurahan Duwet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2024.
2. Ditetapkannya Rancangan Peraturan Kalurahan Duwet Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal) menjadi Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

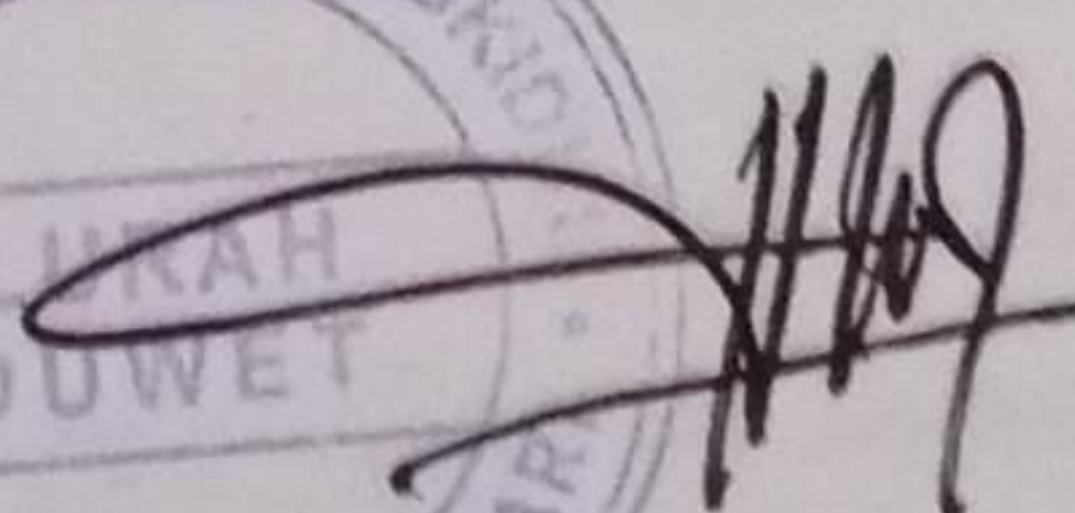
Ditetapkan di Duwet

pada tanggal 29 Desember 2023

KETUA BAMUSKAL DUWET

  
SUPARNA

LURAH DUWET

  
WARSITO



## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023  
 J a m : 09 : 00 s/d selesai  
 Tempat : Aula Balai Kalurahan Duwet  
 Acara : Rapat / sidang penetapan APBKal tahun anggaran 2024

| No | N a m a              | Alamat       | Jabatan      | Tanda Tangan |
|----|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Supriya              | Dungguloh II | Tata laksana |              |
| 2  | Erra Karyasti D.K    | Duwet        | Dukuh        |              |
| 3  | Surotmi              | Jambe        | Dukuh        |              |
| 4  | Heni Ekawati         | Jogoloyo     | Dukuh        |              |
| 5  | Istiyarti            | Gondang      | staf         |              |
| 6  | Dewi Andriyani       | Dunggubah 2  | Uler-ula     |              |
| 7  | Martini              | Duwet        | Bamuskal     |              |
| 8  | Iwan Sukasno         | Dunggubah II | pangripta    |              |
| 9  | Gunawan              | Jogoloyo     | Danarta      |              |
| 10 | SUGIYANTO            | Jambe        | Bamuskal     |              |
| 11 | SUGIMAN.             | Dunggubah II | "            |              |
| 12 | SUNANPAR             | Jogoloyo.    | "            |              |
| 13 | JOKO. S.             | Dunggubah II | "            |              |
| 14 | SUDIRO               | Dunggubah II | "            |              |
| 15 | Harfanto             | Jambe        | Jagabaya.    |              |
| 16 | Nur Hsan Duririyanti | Dunggubah II | Carik        |              |
| 17 | Suparso              | Gondang      | Bamuskal     |              |
| 18 | Warsito              | Dunggubah II | Lurah        |              |
| 19 | Tri Krswanto         | Koradit 01   | Babasa       |              |
| 20 | MUBARI               | Dunggubah    | staf         |              |
| 21 | Lasini               | Dunggubah II | Dukuh        |              |
| 22 | WIPRIANTO            | — II — A     | — II —       |              |
| 23 |                      |              |              |              |
| 24 |                      |              |              |              |

Duwet, 29 Desember 2023

Lurah Duwet



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN DUWET  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>( Rp )      | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 30.500.000,00           |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 1.842.945.000,00        |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain                  | 1.500.000,00            |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>1.874.945.000,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 641.482.332,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 406.692.121,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 752.703.500,00          |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 109.518.014,00          |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>1.910.395.967,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>(35.450.967,00)</b>  |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 85.450.967,00           |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya                | 85.450.967,00           |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan                | 50.000.000,00           |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa                 | 50.000.000,00           |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>35.450.967,00</b>    |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

DUWET, 30 Desember 2023

LURAH DUWET



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN DUWET  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal


| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDAHA    |
|---------------|------|--|------------------------------|---------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                            | 5             |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>  |                              |               |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa   | 30.500.000,00                |               |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer  | 1.842.945.000,00             |               |
|               | 4.3. | Pendapatan Lain-lain   | 1.500.000,00                 |               |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   | <b>1.874.945.000,00</b>      |               |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>   |                              |               |
| 1             |      | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                              | <b><u>913.719.817,00</u></b> |               |
| 1.1.          |      | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b> | <b>780.307.372,00</b>        |               |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                             | 46.800.000,00                | ADD           |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 46.800.000,00                |               |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                          | 510.120.000,00               | ADD           |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 510.120.000,00               |               |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                      | 35.347.392,00                | ADD           |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 35.347.392,00                |               |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)            | 75.032.440,00                | ADD, DLL, PAD |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 75.032.440,00                |               |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD   | 49.214.940,00                | ADD           |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 49.214.940,00                |               |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 7.910.000,00                 | ADD           |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 7.910.000,00                 |               |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  | 31.872.600,00                | ADD, PBH      |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 31.872.600,00                |               |
| 1.1.08        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa               | 24.010.000,00                | DDS           |
| 1.1.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 24.010.000,00                |               |
| 1.2.          |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                               | <b>80.943.827,00</b>         |               |
| 1.2.03        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )             | 74.600.000,00                | DDS           |
| 1.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 220.000,00                   |               |
| 1.2.03        | 5.3. | Belanja Modal  | 74.380.000,00                |               |
| 1.2.94        |      | Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional                              | 2.250.000,00                 | PAD           |
| 1.2.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 2.250.000,00                 |               |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                            | 5          |
| 1.2.95        |      | Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja                                      | 4.093.827,00                 | ADD        |
| 1.2.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 4.093.827,00                 |            |
| 1.3.          |      | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan       | 34.406.750,00                |            |
| 1.3.02        |      | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)                                | 34.006.750,00                | DDS        |
| 1.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 22.406.750,00                |            |
| 1.3.02        | 5.3. | Belanja Modal  | 11.600.000,00                |            |
| 1.3.90        |      | Penyusunan Monografi Desa  | 400.000,00                   | PAD        |
| 1.3.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 400.000,00                   |            |
| 1.4.          |      | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan           | 16.035.000,00                |            |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                             | 4.425.000,00                 | PAD        |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 4.425.000,00                 |            |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)                  | 3.010.000,00                 | PBH        |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 3.010.000,00                 |            |
| 1.4.05        |      | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa                           | 4.000.000,00                 | PBH        |
| 1.4.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 4.000.000,00                 |            |
| 1.4.07        |      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                | 400.000,00                   | PBH        |
| 1.4.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 400.000,00                   |            |
| 1.4.08        |      | Pengembangan Sistem Informasi Desa   | 4.200.000,00                 | DDS        |
| 1.4.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 4.200.000,00                 |            |
| 1.5.          |      | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>   | <b>2.026.868,00</b>          |            |
| 1.5.06        |      | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  | 2.026.868,00                 | ADD        |
| 1.5.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 2.026.868,00                 |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                      | <b><u>750.578.500,00</u></b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>   | <b>21.000.000,00</b>         |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 21.000.000,00                | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 21.000.000,00                |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>  | <b>60.734.000,00</b>         |            |
| 2.2.01        |      | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)       | 12.028.000,00                | DDS        |
| 2.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 12.028.000,00                |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                   | 21.268.000,00                | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 21.268.000,00                |            |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan   | 24.848.000,00                | DDS        |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 18.148.000,00                |            |
| 2.2.04        | 5.3. | Belanja Modal  | 6.700.000,00                 |            |
| 2.2.91        |      | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)                                      | 2.590.000,00                 | DDS        |
| 2.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 2.590.000,00                 |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                    | <b>637.279.500,00</b>        |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)               | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                           | 5          |
| 2.3.01        |      | Pemeliharaan Jalan Desa  | 224.868.000,00              | DDS        |
| 2.3.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 6.300.000,00                |            |
| 2.3.01        | 5.3. | Belanja Modal  | 218.568.000,00              |            |
| 2.3.02        |      | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang   | 86.085.000,00               | DDS, PBK   |
| 2.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 365.000,00                  |            |
| 2.3.02        | 5.3. | Belanja Modal  | 85.720.000,00               |            |
| 2.3.05        |      | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)               | 43.431.000,00               | DDS        |
| 2.3.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 475.000,00                  |            |
| 2.3.05        | 5.3. | Belanja Modal  | 42.956.000,00               |            |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                              | 128.133.000,00              | DDS        |
| 2.3.10        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 300.000,00                  |            |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal  | 125.833.000,00              |            |
| 2.3.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)                       | 156.762.500,00              | DDS        |
| 2.3.12        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 150.000,00                  |            |
| 2.3.12        | 5.3. | Belanja Modal  | 156.612.500,00              |            |
| 2.4.          |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>  | <b>31.565.000,00</b>        |            |
| 2.4.01        |      | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN                | 31.565.000,00               | DDS        |
| 2.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 31.565.000,00               |            |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>  | <b><u>54.329.636,00</u></b> |            |
| 3.3.          |      | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>  | <b>35.759.636,00</b>        |            |
| 3.3.05        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 30.759.636,00               | PBH        |
| 3.3.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 425.636,00                  |            |
| 3.3.05        | 5.3. | Belanja Modal  | 30.334.000,00               |            |
| 3.3.93        |      | Operasional Karang Taruna  | 5.000.000,00                | PBH        |
| 3.3.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 5.000.000,00                |            |
| 3.4.          |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>   | <b>18.570.000,00</b>        |            |
| 3.4.92        |      | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)               | 5.320.000,00                | PBH        |
| 3.4.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 5.320.000,00                |            |
| 3.4.95        |      | Operasional LPMD dan/atau LPMP   | 5.250.000,00                | PBH        |
| 3.4.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 5.250.000,00                |            |
| 3.4.96        |      | Operasional PKK  | 8.000.000,00                | PBH        |
| 3.4.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 8.000.000,00                |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>   | <b><u>82.250.000,00</u></b> |            |
| 4.2.          |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>   | <b>68.350.000,00</b>        |            |
| 4.2.01        |      | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)               | 68.350.000,00               | DDS        |
| 4.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 68.350.000,00               |            |
| 4.6.          |      | <b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>   | <b>13.900.000,00</b>        |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                            | 5          |
| 4.6.02        |      | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 13.900.000,00                | DDS        |
| 4.6.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 13.900.000,00                |            |
| <b>5</b>      |      | <b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>   | <b><u>109.518.014,00</u></b> |            |
| 5.1.          |      | Sub Bidang Penanggulangan Bencana                                      | 1.518.014,00                 |            |
| 5.1.00        |      | Kegiatan Penanggulan Bencana   | 1.518.014,00                 | DDS        |
| 5.1.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga  | 1.518.014,00                 |            |
| 5.3.          |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak  | 108.000.000,00               |            |
| 5.3.00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak  | 108.000.000,00               | DDS        |
| 5.3.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga  | 108.000.000,00               |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>  | <b>1.910.395.967,00</b>      |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>   | <b>(35.450.967,00)</b>       |            |
| 6.            |      | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                              |            |
| 6.1.          |      | Penerimaan Pembiayaan  | 85.450.967,00                |            |
| 6.2.          |      | Pengeluaran Pembiayaan   | 50.000.000,00                |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>  | <b>35.450.967,00</b>         |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                  | <b>0,00</b>                  |            |

DUWET, 30 Desember 2023  
LURAH DUWET

  
 WARSITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI

NOMOR : 92 / KPTS / 2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN DUWET  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN 2024

HASIL EVALUASI TERHADAP TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN DUWET TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

A. WAKTU PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

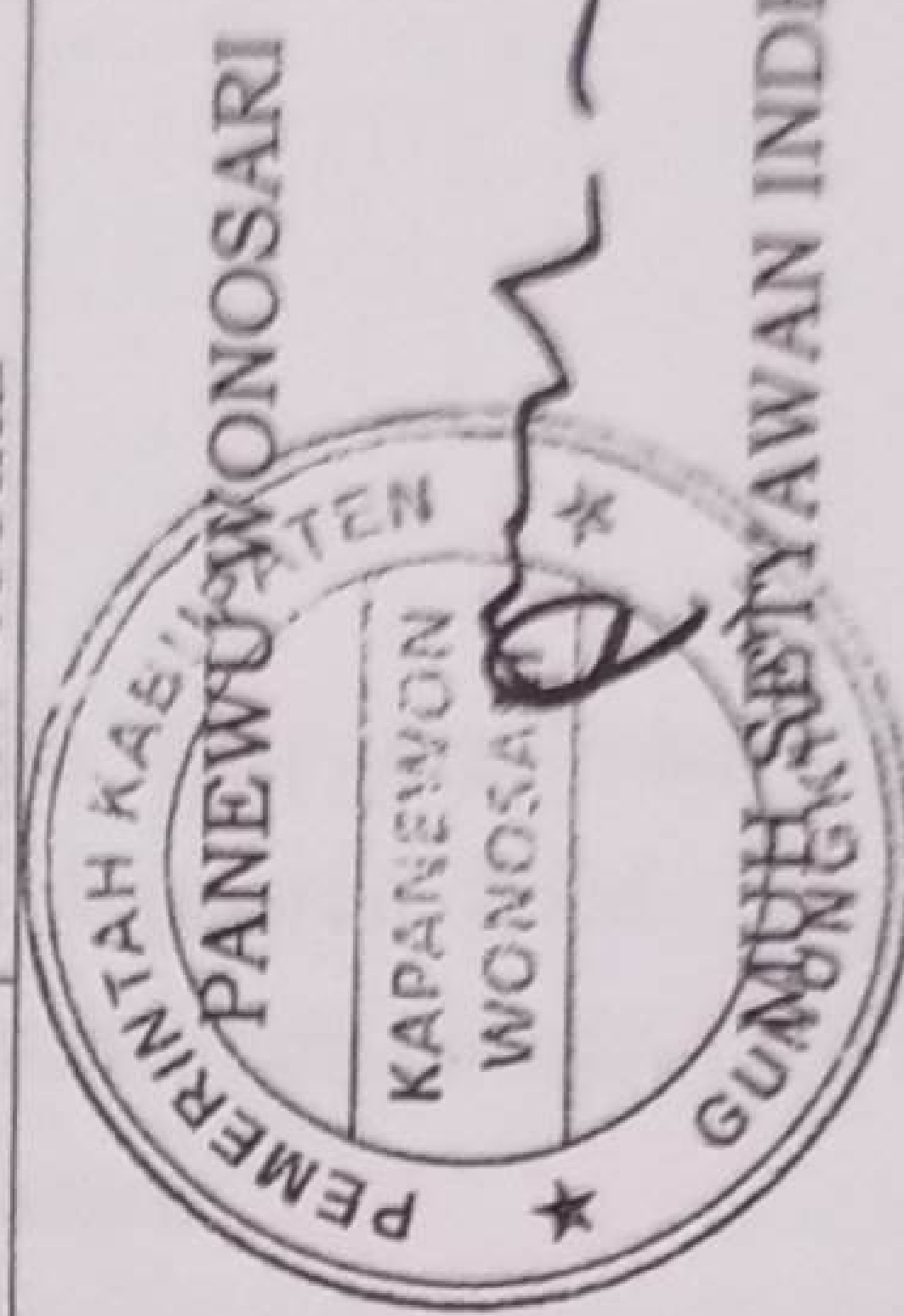
| Tanggal Penyepakatan Rancangan dengan Bamuskal | Tanggal Diterima Rancangan di Kapanewon | Ketentuan (Pasal 10 ayat (1) Perda 4 Tahun 2014)  | Hasil                  |
|--|---|---|------------------------|
| belum  | 23 Desember 2023                        | Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, APBDesa, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintahan Kalurahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa <b>paling lama 3 (tiga) hari kerja</b> disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan evaluasi. | belum sesuai ketentuan |

B. SUBSTANSI MATERI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

| No | Uraian            | Kondisi yang ditemukan   | Rekomendasi  |
|----|-------------------|--|--|
| 1. | Bagian Judul      | --   | --   |
| 2. | Bagian Menimbang  | --   | --   |
| 3. | Bagian Mengingat  | Konsideran belum lengkap, regulasi ada yang sudah tidak berlaku.                   | 1. Regulasi dalam Peraturan Kalurahan No. 11, 12, dan 13 agar dihapus karena sudah tidak berlaku.<br>2. Regulasi disesuaikan yang terbaru. |
| 4. | Bagian PENDAPATAN | 1. Pendapatan PAD dari bagi hasil Bumkalma sebesar Rp. 250.000,- belum dimasukkan. | 1. Pendapatan PAD dari bagi hasil Bumkalma agar dimasukkan dalam kerjasama dengan pihak ke 3 sebesar Rp. 250.000,-                         |
| 5. | Bagian BELANJA    | 1. Satuan volume belum sesuai  | 1. Sesuaikan dengan regulasi   |
| 6. | Bagian PEMBIAYAAN |  |  |

C. SISTEMATIKA DAN PENULISAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

| No | Uraian        | Kondisi yang ditemukan  | Ketentuan (Perbup 41 Tahun 2014) | Rekomendasi  |
|----|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. | Jenis Huruf   | Jenis Bookman old style | Jenis Bookman old style          | Telah sesuai |
| 2. | Ukuran Huruf  | Ukuran 12               | Ukuran 12                        | Telah sesuai |
| 3. | Ukuran kertas | Ukuran F4               | Ukuran F4                        | Telah sesuai |



GUMUNG SUTYAWAN INDRIYANTO